

STRATEGI ETHIOPIA DALAM MENGHADAPI MESIR TERKAIT DOMINASI *HYDROENERGY* DI KAWASAN SUNGAI NIL

Author: Diya Meiliza Putri

Email: diyameiliza0129@student.unri.ac.id

Pembimbing: Ahmad Fuadi S.IP, M.Si

E-mail: ahmad.fuadi@lecturer.unri.ac.id

Bibliografi: 9 buku, 24 jurnal, 36 website

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru– Pekanbaru 28293

Telp./Fax. 0761-63277

Abstract

This research analyzes Ethiopia's strategy in dealing with Egypt regarding hydroenergy in the Nile River Region. Egypt's hegemony on the Nile has made the construction of hydraulic construction in the Nile region of Ethiopia impossible. In an effort to secure hydro, Ethiopia launched the Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD) construction strategy to increase its national energy. This development is based on the increasing population in Ethiopia which requires greater use of energy apart from the essential role of the Nile for the people of Ethiopia. In launching its strategy, Ethiopia uses a normative mechanism through trilateral negotiations with Egypt and Sudan. The use of Ethiopia's bargaining power is increasing through opposition to the legitimacy of Egypt's status-quo in regional level negotiation forums, such as the Nile Basin Initiative (NBI). This strategy is not only useful for securing national water but also creates a hegemon shift scenario in the Nile River area.

This research uses a qualitative method, with data collection techniques through literature study sourced from several books, journals, articles, websites. This research uses Realism perspective and Hydro-Hegemony theory. In explaining hydro-hegemon, there are four pillars that are used to explain the domination of a country over other countries, namely Geographical power, Material power, Bargaining power, and Ideational power.

The results of this paper indicate that the normative mechanism used for the development of GERD has been successful with the trilateral agreement reached with Egypt and Sudan. However, to replace Egypt's position as hegemon, Ethiopia needs to develop its bargaining power once its hydraulic project is completed.

Keywords: Nile River, Water Securitization, Hydro-Hegemony Hydroenergy
Domination, Grand Ethiopia Renaissance Dam

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan menganalisis mengenai strategi Ethiopia dalam menghadapi dominasi Mesir di Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai transnasional yang melintasi sebelas negara yaitu Burundi, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Sudan Selatan, Sudan, Tanzania, dan Uganda. Sungai Nil terdiri dari dua hulu yang berbeda yaitu Nil Putih yang berasal dari Danau Victoria di Uganda dan Nil Biru yang berasal dari Danau Tana. Kedua cabang Sungai Nil ini bertemu di Khartoum, Sudan dan merupakan akses vital bagi keberlangsungan pengelolaan dan pembangunan di negara basin. Manajerial air di Sungai Nil menjadi konsen sekaligus agenda politik yang cukup serius bagi negara basin. Pengelolaan air di Sungai Nil didominasi oleh Mesir berkat kesepakatan yang disahkan di tahun 1929 dan 1959. Dalam kesepakatan tersebut, Mesir memperoleh hak hak Mesir atas 48 miliar meter kubik aliran air, hak air di musim kemarau, dan hak veto atas proyek pengelolaan air di hulu yang selanjutnya mencapai 55 miliar meter kubik air.¹ Kontrol Mesir atas Sungai Nil dinilai ilegal sebab dilegitimasi sebelum negara-negara basin mencapai kemerdekaan.

Mesir direpresentasikan sebagai hegemon melalui kombinasi material, bargaining, dan ideasionalnya yang lebih kuat yang mana telah memungkinkannya untuk mengembangkan status hydro-hegemon dan untuk mempertahankan rezim

yang melayani kepentingan nasionalnya.² Melihat dari konsep *hydro-hegemon*, kapasitas hegemon dalam *control* sumber daya air memberikan keuntungan atasnya terhadap pemanfaatan air serta memiliki kapasitas untuk mempengaruhi negara-negara basin sungai untuk menerima tidak hanya otoritas hegemon, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang dimaksudkan untuk memaksakan satu solusi atas yang lain.³

Inisiatif kooperatif dalam hal manajerial air juga dimunculkan dalam negosiasi di tingkat kawasan. Pada tahun 1999, terbentuk Nile Basin Initiative (NBI) yang diperuntukan sebagai forum negara-negara basin untuk saling berdialog dalam hal manajerial air di Sungai Nil. Forum ini juga memprakarsai negosiasi Kooperatif Framework Agreement (CFA) untuk mencapai status legal terbaru. Namun upaya ini masih jauh dari terciptanya rekonsiliasi yang mapan untuk seluruh negara basin.

Ketidaksepahaman muncul dari perbedaan pandangan antara negara hulu dan hilir dalam negosiasi CFA, terutama Mesir yang menentang beberapa poin dalam peraturan tersebut. Dalam hal ini, Ethiopia memprakarsai ratifikasi CFA yang mana memicu ketegangan antara keduanya.

Gagasan Ethiopia untuk membangun konstruksi hidrolis untuk pemenuhan energi di negaranya pada tahun 2011 kembali memunculkan dinamika tensi kedua negara. Ethiopia yang memiliki 86% kapasitas dari Nil Biru membuat strategi peningkatan hydroenergy melalui pembangunan Grand

¹ Andrew Carlson, "Who Owns the Nile? Egypt, Sudan, and Ethiopia's History-Changing Dam | Origins: Current Events in Historical Perspective," *History Departments at The Ohio State University and Miami University*, 2013, <https://origins.osu.edu/article/who-owns-nile-egypt-sudan-and-ethiopia-s-history-changing-dam>.

² Ana Elisa Cascão, "Changing Power Relations in the Nile River Basin: Unilateralism vs. Cooperation?," *Water Alternatives* 2, no. 2 (2009): 245–68. Hlm.248

³Mark Zeitoun and Jeroen Warner, "Hydro-Hegemony - A Framework for Analysis of Trans-Boundary Water Conflicts," *Water Policy* 8, no. 5 (2006): 435–60, doi:10.2166/wp.2006.054.

Ethiopia Renaissance Dam (GERD). Strategi *hydroenergy power* yang digagas Ethiopia melalui kapasitas bendungan yang besar tentu akan menggeser keseimbangan geopolitik di Cekungan Sungai Nil yang dikhawatirkan Mesir akan pasokan volumetrik airnya.⁴

Keadaan ini memunculkan ketegangan diantara keduanya dimana sebelumnya tensi kedua negara juga mengalami pasang surut yang sangat dinamis. Ethiopia menilai bahwa pembangunan yang ada dinegaranya tidak merugikan negara lainnya, termasuk Mesir. Sementara Mesir tetap memunculkan pertentangan atas pembangunan yang dilaksanakan Ethiopia. Meskipun begitu, situasi diantara kedua negara masih bersifat *low intensity conflict*. Dengan demikian, dalam tulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai strategi Ethiopia dalam menghadapi dominasi Mesir di Sungai Nil.

KERANGKA TEORI

Perspektif Realisme

Penelitian ini menggunakan perspektif Realisme Klasik. Realisme merupakan sebuah salah satu bentuk perspektif tradisional HI yang menganggap bahwa *human nature* sebagai fokus dari perilaku negara. Sifat alami manusia yang egois dan individualistik akan membuat konflik tidak terhindarkan dan menimbulkan perang.⁵

Menurut pandangan realisme, bentuk dari sistem internasional yang anarki adalah

⁴Stefan Liersch, Hagen Koch, and Fred Fokko Hattermann, "Management Scenarios of the Grand Ethiopian Renaissance Dam and Their Impacts under Recent and Future Climates," *Water (Switzerland)* 9, no. 10 (2017): 1–24, doi:10.3390/w9100728.

⁵ Hans J Morgenthau, *Politics Among Nation: The Struggle For Power and Peace*, Alfred A. Knopf, 1st Editio (New York: Alfred A. Knopf, 1948).

ketiadaan otoritas yang mengatur relasi antar negara. Negara dilihat sebagai *principal actor* atau aktor terpenting dalam hubungan internasional (*state-centric*). Dalam mengejar kepentingan nasional, negara menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak power. Kapasitas power akan sangat menentukan hubungan antar negara sehingga konsep *power* menjadi tujuan utama.

Teori Hydro-Hegemony

Hydro-hegemony adalah sebuah hegemoni yang aktif atas permasalahan air, hegemoni yang berkaitan dengan batas air.⁶ Dalam menjelaskan hegemoni atas air, negara tidak hanya melakukan pendekatan secara *hard power* namun juga dengan *soft power*. Negosiasi dan interpretasi perjanjian lintas batas dipengaruhi oleh asimetri kekuasaan, berbagai jenis konflik dan geografi (hulu/hilir).⁷

Studi *hydro* diklasifikasikan atas bentuk yang terbuka (*overt*) maupun terselubung (*covert*) dimana terbagi dalam aspek seperti *Geographical power*, *Material power*, *Bargaining power*, *Ideational power*.⁸ Dalam menciptakan kepatuhan terhadap negara hegemon, *hydro-hegemony* melihat empat mekanisme yang dapat digunakan. *Pertama*, mekanisme koersif dapat dilakukan melalui kekuatan militer, tindakan rahasia atau tekanan langsung. *Kedua*, mekanisme utilitarian menggunakan *carrot and stick* (pemberian insentif dan hukuman). *Ketiga*, mekanisme normatif

⁶Zeitoun and Warner, "Hydro-Hegemony - A Framework for Analysis of Trans-Boundary Water Conflicts."

⁷ Joyeeta Gupta, "The Watercourses Convention, Hydro-Hegemony and Transboundary Water Issues," *International Spectator* 51, no. 3 (2016): 118–31, doi:10.1080/03932729.2016.1198558.

⁸ Ana Elisa Cascão and Mark Zeitoun, "Power, Hegemony, and Critical Hydropolitics," in *Transboundary Water Management*, ed. J. Ojendal A. Earle, A. Jägerskog (UK: Earthscan, 2010), 27–194.

dengan menggunakan suatu perjanjian sebagai simbolisasi kerjasama. *Keempat*, mekanisme ideologis dijalankan dengan *soft power*, sekritisasi isu, atau menciptakan wacana yang disetujui bersama.

Level Analisis: Negara

Pada tulisan ini, level analisis yang digunakan penulis adalah negara bangsa. Level analisis negara bangsa merupakan level analisis yang menerangkan fenomena antara hubungan negara dalam sistem internasional dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik individualnya.⁹ Pemilihan level analisis negara bangsa berkaitan dengan situasi yang dihadapi Ethiopia di Sungai Nil melalui transformasi dari strategi dan kepentingan Ethiopia untuk memenuhi kebutuhan air domestiknya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa data sekunder yang berbasis pustaka atau library research. Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari berbagai sumber seperti Jurnal, Buku, Working Paper, Dokumen Pemerintah, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya dan juga website dari sumber internet yang memiliki relevansi terhadap tulisan ini.

PEMBAHASAN

Nilai Strategis Sungai Nil

Air menjadi unsur penting untuk mendorong atau meruntuhkan suatu peradaban, menjadi sumber konflik dan meningkatkan tensi antar negara. Hal ini penting untuk nutrisi, produksi pangan, sanitasi, dan produksi ekonomi (rekreasi,

pembangkit listrik, transportasi, dll), dan mewujudkan nilai simbolis dan budaya.¹⁰

Sungai Nil menyediakan cakupan area seluas 3,349,000 km² dengan sumber daya alam yang berperan penting bagi masyarakat di negara basin. Sungai Nil menyediakan cakupan wilayah fisiografis yang beragam dengan 5 sub-wilayah (dataran tinggi, permukaan air terbuka/danau, lahan basah & rawa, tanah datar, dan gurun) yang kaya akan ragam biodiversiti.

Ekosistem sungai Nil yang menyediakan keberagaman bentang alam memberikan keuntungan bagi masyarakat basin Sungai untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Diantara pemanfaatan tersebut seperti kebutuhan minum masyarakat, sektor agrikultur, bahan mentah untuk material industri, obat-obatan, makanan, hingga hydro-energy yang dihasilkan oleh air yang mengalir di Sungai Nil dipergunakan untuk membangkitkan listrik ke rumah-rumah penduduk.

Dalam manajemen pengelolaan air yang baru di Sungai Nil, negara riparian tidak hanya berfokus pada perencanaan investasi dan pembangunan projek. Tetapi menggunakan sumber air dengan bijak untuk memaksimalkan manfaat, meningkatkan ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Terdapat dua konsep yang menjelaskan nilai ekonomi air yaitu *user value* dan *system value*. *User value* adalah gagasan bahwa air memiliki nilai ekonomi bagi pengguna tertentu di lokasi dan waktu tertentu. Sementara *System value* ditentukan oleh interaksi dan besarnya beberapa hubungan yang berbeda, termasuk ukuran kehilangan penguapan dan

⁹ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990).

¹⁰ Dr Karyabwite, "Water Sharing in the Nile River Valley," *UNEP*, 2000, http://www.ihwb.tu-darmstadt.de/media/fachgebiet_ihwb/lehre/iwrdm/literature/watersharinginthenilerivervalley.pdf.

rembesan, potensi pembangkit listrik tenaga air di lokasi yang berbeda dan besarnya nilai pengguna pertanian di lokasi yang berbeda.¹¹

Sektor agrikultur merupakan konsumsi terbesar dari pemanfaatan air di Sungai Nil secara luas berperan penting dalam menyumbang GDP negara-negara basin sungai. Sistem pertanian di negara basin Sungai Nil sekitar 87% berbasis pada pertanian hujan termasuk pertanian kecil tadah hujan, pertanian dataran tinggi atдах hujan, forest based, dan pertanian tadah hujan mekanis. Produktivitasnya cukup tinggi meskipun penggunaan sistem tradisional masih menjadi rintangan masih sejumlah negara basin.

Produktivitas pertanian yang bernilai tinggi adalah sistem pertanian irigasi yang memanfaatkan aliran air Sungai Nil. Sekitar 97% pertanian sistem irigasi ini berada di Mesir dan Sudan dan 3% sisanya tersebar di negara-negara hulu. Dalam sektor akuakultur, Mesir lebih mumpuni dibandingkan negara basin lainnya dengan menguasai sekitar 83% produksi ikan di wilayah Sungai Nil. Pengembangan sistem akuakultur Mesir dimanfaatkan melalui danau, waduk, rawa, dan aliran anak Sungai Nil lainnya. Terkait hal tersebut, negara-negara basin lainnya juga ingin memanfaatkan potensi sumber daya Nil untuk memajukan sektor agrikultur dan akuakulturnya.

Faktor Pendorong Esensialitas Sungai Nil

Dataran Afrika yang memiliki variasi iklim menyebabkan beberapa negara kesulitan untuk mendapatkan akses air juga disertai dengan tingkat curah hujan yang

rendah. UNEP memperkirakan bahwa mulai sekarang hingga tahun 2027 hampir sepertiga penduduk dunia akan mengalami krisis air.¹² Krisis air juga dipicu oleh perubahan iklim yang semakin ekstrem dimana ragam biodiversity yang hidup di dataran kering Afrika dikhawatirkan akan mengalami kepunahan.

Pada beberapa negara-negara basin Sungai Nil, intensitas curah hujan yang rendah membuat kawasan ini bertumpu pada eksistensi Sungai Nil. Mesir merupakan negara basin memiliki intensitas hujan yang paling rendah dengan <50 rata-rata curah hujan. Di samping itu, bentang alam Mesir yang 2/3 wilayahnya didominasi oleh padang pasir turut menyebabkan tingkat kekeringan yang tinggi di wilayahnya. Dengan tingkat curah hujan yang rendah dan tidak stabil, pengelolaan air di Mesir sangat bergantung pada aliran Sungai Nil. Sebaliknya, Ethiopia yang berada di dataran yang lebih tinggi menerima curah hujan yang cukup sekitar 510 mm hingga 1.525 mm curah hujan di musim penghujan Juli-September. Posisi Ethiopia yang berada di negara hulu Sungai Nil juga menguntungkan Ethiopia sebab menguasai sekitar 86% dari aliran Nil.

Populasi yang mengalami peningkatan memantik kebutuhan akan air yang tinggi. Angka populasi Afrika meningkat dari 9% di tahun 1960 diproyeksikan menjadi 19% di tahun 2025 dari jumlah persentase populasi dunia. Ukuran populasi secara global dan di Afrika sangat ditentukan oleh indeks kesuburan, migrasi dan kematian.¹³ Fertilitas yang tinggi serta rendahnya pengaturan kelahiran yang ada di negara-negara ini menyebabkan

¹¹ Dale Whittington, Xun Wu, and Claudia Sadoff, "Water Resources Management in the Nile Basin: The Economic Value of Cooperation," *Water Policy* 7, no. 3 (2005): 227–52, doi:10.2166/wp.2005.0015. Hal.230

¹² Karyabwite, "Water Sharing in the Nile River Valley." Hal. 4

¹³ Africa Progress and Group Report, "Draft 2020 Africa Progress Group Report 1," 2020, 1–152. Hal. 12

ledakan populasi yang akan terus berkembang hingga tahun-tahun berikutnya. Diantara negara yang memiliki populasi tertinggi di kawasan Sungai Nil adalah Ethiopia (114,963,588), Mesir (102,334,404), dan DR. Congo (89,561,403).¹⁴

Masalah global yang turut mendorong esensialitas Sungai Nil adalah krisis iklim. Fenomena krisis iklim yang terjadi di dataran Afrika seperti peningkatan suhu, kenaikan permukaan laut, perubahan corak hujan dan cuaca ekstrim. Keadaan ini tentunya mengancam keselamatan manusia, ketahanan air dan pangan, serta pengembangan sosial-ekonomi alam. Sebagian besar Afrika telah menghangat lebih dari 1°C sejak 1901, dengan peningkatan gelombang panas dan hari-hari panas.¹⁵ Hal ini menyebabkan sektor vital seperti agrikultur mengalami penurunan produktivitas dengan kekeringan ekstrim dan banjir yang sulit untuk diprediksi.

Dinamika Hubungan Ethiopia-Mesir Terkait Hydro-Politic di Sungai Nil

Hubungan Ethiopia dan Mesir mengalami pasang surut yang sangat dinamis dengan agenda politik yang berbeda. Pada masa pra-kemerdekaan, Mesir menjadi arena politik penting bagi sejumlah kekuatan besar yang pada saat itu berkuasa di Afrika. Di antara penguasaan Eropa atas Afrika, Inggris berperan besar dalam mengamankan negosiasi hidro di Mesir. Perjanjian bilateral Inggris (atas nama Mesir dan Sudan) dengan Ethiopia dilakukan di

Addis Ababa tahun 1902 menyatakan ‘tiada pembangunan di area Nil Biru, danau Tana’ atau apapun yang menghambat aliran Sungai Nil. Juga perjanjian tahun 1906 antara Inggris (atas nama Mesir), Perancis, dan Italia (atas nama Ethiopia).

Mesir memperoleh legitimasi atas manajerial air di Sungai Nil melalui perjanjian 1929 dan perjanjian 1959 yang dilakukan bersama Inggris. Dengan perjanjian ini Mesir mampu mendominasi aliran Sungai Nil yang akan mengalir ke negaranya serta membatasi hak pembangunan di area Sungai Nil yang sekiranya membahayakan aliran airnya.

Ethiopia mengkritik hak Mesir atas aliran Sungai Nil dimana validasi dari kesepakatan yang diampu Mesir tidak legal dan tidak diratifikasi oleh badan pemerintahan. Selain itu, kondisi negara basin yang saat itu belum mencapai kemerdekaan menjadi tolak ukur Ethiopia untuk mengkritik dominasi Mesir atas Sungai Nil. Kritik ini juga didorong oleh negara hulu lainnya yang ingin menggantikan kesepakatan pembagian air dengan perjanjian multilateral.

Hegemoni Mesir atas Sungai Nil

Mesir telah direpresentasikan “*the gift of Nile*” karena dukungan yang diberikan oleh Sungai Nil terhadapnya melalui pengembangan infrastruktur dan irigasi yang lebih luas. Dalam mengontrol air Sungai Nil, Mesir menggunakan kekuatannya dengan melakukan anekasasi pada wilayah di luar teritorinya selama berabad-abad.

Pada masa pendudukan Eropa di Afrika, Mesir memperoleh keuntungan dari agenda politik Inggris yang saat itu menduduki Mesir. Mesir memperoleh hak pemanfaatan Sungai Nil sebesar 48 bcm pada 1929 dan 55,5 bcm pada 1959 serta

¹⁴ “African Countries by Population (2022) - Worldometer,” accessed February 20, 2022, <https://www.worldometers.info/population/countries-in-africa-by-population/>.

¹⁵ “Climate Change Is an Increasing Threat to Africa | UNFCCC,” *United Nation Climate Change*, October 27, 2020, <https://unfccc.int/news/climate-change-is-an-increasing-threat-to-africa>.

hak atas air di musim kemarau yang harus dialirkan ke Mesir, memonitor aliran air dari hulu, hak untuk membangun proyek di Sungai Nil tanpa persetujuan negara hulu dan memberikannya hak untuk memveto setiap proyek hulu.¹⁶

Pengembangan dominasi Mesir atas Sungai Nil juga didorong oleh kombinasi kekuatan material, bargaining, dan ideasionalnya yang mampu mempertahankan status quo hingga abad ke 21. Dalam komponen material terdapat indikator seperti infrastruktur, ekonomi dan militer yang mendorong Mesir untuk meluncurkan agenda geopolitiknya atas Sungai Nil. Mesir menjadi exploitator terbesar yang dengan kapasitas total 7 bendungan serta 26 skema irigasi skala kecil maupun besar sekitar 3,45 juta hektar (3,4% dari total luas negara) yang tersebar di sepanjang teritorial Nil.

Ekonomi Mesir juga menjadi faktor penting dalam upaya dominasi Sungai Nil. Ekonomi Mesir merupakan yang tertinggi di negara basin dengan pendapatan per kapita Mesir di tahun 2021 sebesar 3,969.334 USD lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 3,569.207 USD.¹⁷ Sektor ekonomi yang variatif dan letak strategis Mesir terhadap kepentingan investasi negara lain, terutama perdagangan internasional dan saluran pipa minyak eksportir minyak menjadi penunjang kekuatan ekonomi Mesir di kawasan. Terkait kedekatan Mesir dengan Barat, agenda militer Mesir juga memperoleh keuntungan yang lebih dominan dibandingakna negara basin lainnya. Dukungan internasional datang sebab medir

dilihat sebagai keypoint dalam menjalankan agenda perdamaian di Timur Tengah. Berdasarkan data dari Global Fire Power tahun 2022 Mesir menempati urutan ke 12 dengan 0.1869 (PwrIdx).¹⁸ Juga anggaran militer Mesir yang tertinggi di antara negara basin Sungai Nil sebesar USD 4.357.200.200. Komponen material ini mejadikan Mesir unggul atas dominasinya di politik hidro Sungai Nil.

Selain dari komponen material yang ada, Mesir juga menjalankan strategi geopolitiknya melalui penekanan terhadap aspek lainnya. Strategi geopolitik Mesir diantaranya:¹⁹

1. Mendirikan angkatan bersenjata untuk merespon dengan cepat berbagai ancaman terhadap aliran air di Sungai Nil
2. Penggunaan pengaruh politik yang mahakuasa dalam perkembangan politik negara basin Sungai Nil, terkhusus Sudan, Ethiopia, dan Uganda
3. Membentuk aliansi politik selama era perang dingin dengan kedua negara superpower, Amerika Serikat saat ini, termasuk negara powerful lainnya seperti Israel
4. Mengamankan pengaruhnya terhadap lembaga peminjaman atau keuangan internasional seperti World Bank atau African Development Bank

¹⁶ Assist Prof and Etlal Salim, "Egyptian-Ethiopian Relations 1952-2015," *Opcion*, vol. 19, 2019. Hal. 2905

¹⁷ "Egypt GDP per Capita, 1982 – 2022 | CEIC Data," accessed June 6, 2022, <https://www.ceicdata.com/en/indicator/egypt/gdp-per-capita>.

¹⁸ "2022 Egypt Military Strength," *Global Fire Power*, accessed March 4, 2022, https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=egypt.

¹⁹ BK Deng, "Cooperation between Egypt and Sudan over the Nile River Waters: The Challenges of Duality," *African Sociological Review / Revue Africaine de Sociologie* 11, no. 1 (2010): 38–62, doi:10.4314/asr.v11i1.51433. Hal. 46

- Mengontrol investasi dari negara anggota Liga Arab terhadap negara basin lainnya

Selain dari strategi sekuritisasi yang digunakan Mesir, produksi energi juga menjadi konsen Mesir dalam penggunaan Sungai Nil. Produksi listrik terbarukan Mesir bertumpu pada hydroenergy yang dihasilkan Sungai Nil. Sekitar 7% dari total 8% produksi energi listrik terbarukan Mesir diproduksi oleh pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Aswan memiliki peranan besar dalam menyumbang kemampuan Mesir dalam produksi listriknya. Bendungan Aswan memiliki kapasitas yang mampu memproduksi 2.100MW untuk penggunaan industrial dan rumah tangga.

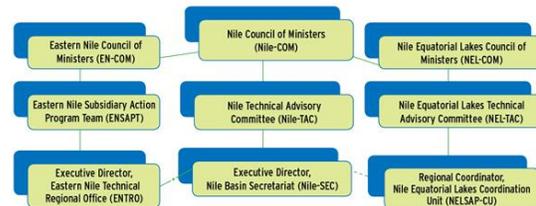
Inisiatif Kooperatif Negara Basin Sungai Nil

Ketiadaan badan manajerial air di kawasan Sungai Nil menyulitkan negara-negara basin untuk mencapai konstruksi legal. Meskipun terlibat sengketa air di beberapa kesempatan, inisiatif kooperatif dibangun untuk menentukan arah kerjasama antar negara basin. Inisiatif kooperatif regional pertama diinisiasi oleh Mesir bernama Ungungu yang berasal dari kata ‘ndugu’ dalam bahasa Swahili yang berarti persaudaraan.²⁰ Selain itu, terdapat Technical Cooperation Committee for the Promotion of the Development and Environmental Protection of the Nile (TECCONILE) yang didirikan pada 1992 oleh Mesir, Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganada dan Zaire (RD. Kongo), dan partisipan lainnya sebagai observer. TECCONILE ditetapkan sebagai skema

transisi untuk jangka waktu tiga tahun yang ditujukan agar diakhir periode itu terbentuk sebuah lembaga permanen untuk seluruh wilayah Sungai Nil.²¹

Dibentuknya *Panel of Expert (PoE)* pada pertemuan keempat Nile-COM tahun 1996 bertujuan untuk membantu Nile River Action Plan. Pada 1997, pembentukan *Nile Basin Initiative* diinisiasi atas bantuan World Bank dan *United Nation Development Program (UNDP)*. Proposal rencana pembentukan Nile Basin Initiative akhirnya disepakati pada 1998 dan disahkan sebagai badan pengembangan kerjasama manajerial di tahun 1999. NBI merupakan sebuah forum bagi negara-negara basin Sungai Nil untuk konsultasi dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya di Sungai Nil. NBI mengaungkan *Share Vision “to achieve sustainable socio-economic development through the equitable utilization of, and benefits from, the common Nile Basin water resources”*.²² Nile Basin Initiative mencakup struktur dan fungsi intitusional masing-masing lembaga yang ada didalamnya. Stuktur dari Nile Basin Initiative adalah

Gambar : Stuktur Nile Basin Initiative



Sumber : Nile Basin Initiative²³

²⁰ Dereje Zeleke Mekonnen, “The Nile Basin Cooperative Framework Agreement Negotiations and the Adoption of a ‘water Security’ Paradigm: Flight into Obscurity or a Logical Cul-de-Sac?,” *European Journal of International Law* 21, no. 2 (2010): 421–40, doi:10.1093/ejil/chq027. Hal.426

²¹ Ibid. Hal.427

²² Ibid.

²³ Nile Basin Initiative, “Who We Are | Nile Basin Initiative (NBI),” accessed September 18, 2021, <https://www.nilebasin.org/index.php/nbi/who-we-are>.

Nile Council of Minister (Nile-COM) yang meliputi *Minister of Water Resource* atau Kementerian Perairan dari setiap negara riparian dengan tugas memberikan panduan kebijakan dan membuat keputusan tentang hal-hal utama yang berkaitan dengan NBI. Nile Basin Secretary yang bertanggungjawab atas program kerjasama negara basin dan program manajerial air.

Nile-COM terbagi atas *Eastern Nile Council of Minister* (EN-COM) dan *Nile Equational Lakes Council of Minister* (NEL-COM). Nile-COM didukung oleh *Nile Technical Advisory Committee* (Nile-TAC), meliputi 20 pejabat senior yang masing-masing negara diwakili oleh 2 orang. *Eastern Nile Technical Regional Office* (ENTRO) adalah cabang eksekutif dan teknis dari *Eastern Nile Subsidiary Action Program* (ENSAP), lembaga yang dimiliki oleh negara Nil Timur (Mesir, Ethiopia, Sudan Selatan, dan Sudan).

Meskipun sudah cukup mapan dalam pengaturan hal-hal terkait manajerial Sungai Nil, Nile Basin Initiative bukanlah solusi jangka panjang atas permasalahan manajerial Sungai Nil. NBI hanya diinisiasi sebagai kerangka sementara sebagai forum untuk berdialog dan berdiskusi antar negara basin.

Pembentukan dan Ratifikasi Nile Basin Cooperative Framework Agreement (CFA)

Objek penting dari Nile Basin Initiative adalah perumusan Cooperative Framework Agreement (CFA). Pembentukan CFA ditujukan sebagai upaya penyusunan instrumen hukum yang komprehensif untuk menjamin akses yang adil dan penggunaan yang setara di wilayah Sungai Nil. Technical Advisory Committee dan Negotiation Committee diamanatkan untuk berkonsultasi dengan pakar internasional terkait prosedur

penandatanganan CFA dan menyerahkan laporan kepada Nile-Com untuk dibahas lebih lanjut.²⁴ Rancangan ini kemudian dikerahkan pada pertemuan Nile-COM di Entebbe, Uganda pada Juni 2007 dimana terdapat Article 14 yang menjadi perdebatan. Mesir mendebat penekatan dalam dalam kalimat '*current uses and rights*' seakan melegitimasi perjanjian 1929 dan 1959 yang akan mengurangi hak Mesir atas Sungai Nil. Dalam pasal tersebut, hak Mesir yang sebelumnya sekitar 55,5 bcm atas Sungai Nil menjadi 1 bcm.

Di sisi lain, draft CFA kemudian dimulai dengan iniatif Ethiopia untuk ratifikasi dimana langkah ini selanjutnya diikuti dengan negara-negara lainnya. Pada 14 Mei 2010, empat negara (Ethiopia, Tanzania, Uganda dan Rwanda) menandatangani Cooperative Framework Agreement (CFA) di Entebbe, Uganda. Lima hari setelahnya, Kenya juga bergabung untuk menandatangani CFA. Burundi ikut bergabung dan menandatangani CFA pada 28 Februari 2011 sementara DR. Kongo juga mendukung langkah ini namun belum menandatangani. Mesir yang menolak kesepakatan ini memutuskan untuk membekukan keanggotaannya di NBI.

Melemahnya Kemampuan Mesir dalam Agenda Hidropolitik di Kawasan

Terkait dengan permintaan sumber daya yang besar akan air diantara negara-negara basin, hak atas Sungai Nil yang tertuang dalam perjanjian 1929 dan 1959 telah kehilangan kekuatannya. Selain itu, faktor internal seperti instabilitas politik, dan perubahan sosial ekonomi Mesir berpeluang dalam merusak tatanan keseimbangan kawasan yang sebelumnya dibangun.

²⁴ Mekonnen, "The Nile Basin Cooperative Framework Agreement Negotiations and the Adoption of a 'water Security' Paradigm: Flight into Obscurity or a Logical Cul-de-Sac?" Hal 429

Gejolak politik Mesir berawal dari kematian Nasser di tahun 1970 yang berangkat melalui gagasan pan-Afrika tentang pembebasan juga memperluas narasi anti-barat dan anti-israel yang mana kebijakan ini juga menyusutkan ekonomi Mesir. Pasca perang melawan Israel, Mesir di bawah Anwar Sadat tahun 1973 berorientasi kepada Barat dengan melakukan perdamaian dengan Israel dan putus hubungan dengan negara-negara Arab dan Afrika. Di bidang ekonomi, Mesir semakin bergantung pada *Gulf Cooperation Council* (GCC) pasca kenaikan harga minyak yang mengguncang negara-negara Arab. Mesir cenderung untuk lebih fokus terhadap politik domestiknya dibanding di tingkat kawasan. Pergolakan politik internal Mesir di abad ke-21 menjadi titik balik berkurangnya power Mesir di antara negara riparian.

Puncak gejolak politik Mesir terjadi di tahun 2010 dengan *Jasmine Revolution* di Tunisia yang kemudian menjadi fenomena gejolak politik Timur Tengah, *Arab Spring*. Gerakan ini dikonsepsikan kedalam lima faktor utama yakni pembangunan ekonomi, legitimasi politik, demografi social, islamisme, dan kemajuan era social media. Gerakan ini terbentuk akibat ketidakseimbangan pembangunan di Mesir yang menyebabkan gap antara golongan kaya dan miskin juga disokong oleh tingginya angka pengangguran sekitar 9,7% antara golongan muda Mesir.²⁵

Faktor lainnya yang menpelopori gerakan revolusi ini adalah legitimasi politik Mesir. Pemerintahan Mubarak yang menyentuh 30 tahun masa pemerintahan dipenuhi oleh ketidakadilan dan kebebasan berpolitik para warga Mesir. Kepemimpinan

Mubarak dinilai tidak kompeten dan korup serta mengubah tatanan pemerintahan Mesir menjadi hirarkis. Akibat dari perubahan fokus Mesir kearah domestik, rotasi kekuatan di negara basin semakin meningkat dimana Ethiopia memanfaatkan momentum ini untuk melancarkan strategi sekuritasi hidro di wilayahnya melalui pembangunan Grand Ethiopia Renaissance Dam (GERD).

Konfigurasi *Hydro-Hegemony* Ethiopia di Nil Biru

Strategi hydroenergy yang digagas Ethiopia dapat dikaji melalui 4 pilar *hydro-hegemony* yang digagas oleh Zeitoun dan Cascao diantaranya geografi, material, bargaining, dan ideasional.²⁶

Terkait dengan geografis, Ethiopia diuntungkan dengan daya tawar terkandung di Nil Biru dimana menyumbangkan sekitar 86% dari total aliran Nil. Secara harfiah, lintasan air Nil Biru terbagi atas Ethiopia dan Sudan sekitar 64% dan 36% dari perbatasan kedua negara. Aliran dari dataran tinggi Ethiopia kemudian bertemu di Khortoum, Sudan dan bergabung dengan aliran anak sungai Dinder dan Rahad.

Aspek material Ethiopia dapat dilihat dari sector ekonomi dan militer. Ekonomi Ethiopia mengalami perkembangan ekonomi yang stabil sekitar 10% per tahunnya, didorong oleh akumulasi modal terkhusus infrastuktur publik dalam 15 tahun terkahir. GDP Ethiopia terus meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2020 menyentuh angka USD107,65 Miliar.²⁷ Dalam hal pengukuran militer, Ethiopia termasuk yang

²⁵ Mohd Irwan Syazli Saidin, "Rethinking the 'Arab Spring': The Root Causes of the Tunisian Jasmine Revolution and Egyptian January 25 Revolution," *International Journal of Islamic Thought* 13, no. 1 (2018): 69–80, doi:10.24035/ijit.06.2018.007. Hal.76

²⁶ Cascão and Zeitoun, "Power, Hegemony, and Critical Hydropolitics." Hal. 32

²⁷ "GDP per Capita (Current US\$) - Ethiopia, Egypt, Arab Rep. | Data," *World Bank*, accessed March 4, 2022, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?contextual=default&locations=ET-EG>.

memiliki kekuatan artileri yang minim namun pengukuran terhadap komparasi kekuatan militer tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan pengalaman tempur, kualitas dari senjata, kualitas sumber daya manusia yang tentunya sukar untuk diukur dimana Ethiopia juga berpengalaman cukup jauh dalam hal perang sipil dan konflik bersenjata. Teknologi dan dukungan internasional juga tidak terlepas dari aspek pendukung Ethiopia. Dalam hal teknologi, Ethiopia berhasil mengembangkan program antariksa dengan inisiasi pembuatan satelit yang didukung China dan berhasil diluncurkan pada Desember 2019.²⁸

Kemampuan bargaining Ethiopia menjadi agenda politik penting dalam hal suksesi strategi sekuritasi Sungai Nil. Dalam negosiasi tersebut, Ethiopia menekankan upaya yang dilakukan untuk keamanan air nasionalnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan disandarkan pada instrumen pembagian air transnasional yaitu *United Nation Convention on Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses 1997* dan *The Helsinki Rules on the Uses of The Water of International Rivers*.

Ethiopia menggunakan kekuatan ideasionalnya untuk mengkampanyekan keputusan dan tindakan terhadap manajerial air di Sungai Nil. Kemampuan ideasional Ethiopia berhasil dalam menggiring negara hulu lainnya untuk mengakui bahwa Mesir melakukan tindakan yang tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Melalui ratifikasi CFA, Ethiopia kembali berhasil untuk membangun diskusi bersama negara-negara hulu untuk mendesak Mesir melakukan

²⁸ "A Tech Revolution in Ethiopia - Nairametrics," accessed March 26, 2022, <https://nairametrics.com/2019/12/20/a-tech-revolution-in-ethiopia/>.

pembagian dan manajerial air yang seimbang.

Strategi Ethiopia Pembangunan Grand Ethiopia Renaissance Dam

Proyek mega-hidrolik Ethiopia GERD pertama kali disurvei pada Oktober 2009 dan July-Agustus 2010 yang kemudian dibuat desain proyek rahasia ditahun yang sama. Pembangunan bendungan ini dikonstruksikan pada April 2011 setelah kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) senilai 4,7 miliar USD diberikan kepada Salini Costruttori.²⁹ Pembangunan ini berlokasi di Benishangul-Gumuz yang dilintasi aliran Nil Biru sekitar 40km dari timur Sudan.

Gambar: Lokasi Pembangunan GERD



Sumber: Pangea Risk³⁰

Bendungan ini berkapasitas menghasilkan 6.000 MW energi listrik dengan cekungan utama yang berfungsi sebagai penampung air sekitar 74 miliar meter kubik. Bendungan ini juga mampu untuk menangani banjir sebesar 19.370 meter kubik per detik,

²⁹ "Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, Benishangul-Gumuz," accessed March 27, 2022, <https://www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa/>.

³⁰ "SPECIAL REPORT: PROSPECTS OF ANOTHER WAR IN THE HORN OF AFRICA – PANGAEA-RISK," January 18, 2021, <https://www.pangea-risk.com/special-report-prospects-of-another-war-in-the-horn-of-africa/>.

mengurangi pelepasan tanah di Sudan sebesar 100 juta meter kubik dan memfasilitasi irigasi sekitar 500 ribu hektar lahan pertanian baru.

Proyek ini berada dibawah Ethiopian Electronic Power Cooperation (EEPCCO) untuk pengoprasian lebih lanjut. Kontraktor yang terlibat dalam proyek ini adalah Alstom, perusahaan teknisi Perancis, yang telah menandatangani kontrak €250 M dengan Metals & Engineering Corporation (METEC) untuk memasok peralatan elektromekanis, turbin, dan generator di pembangkit listrik Bendungan GERD.³¹ Strategi finansial GERD didukung oleh sumber dana internal maupun eksternal. Sumber dana internal Ethiopia mencakup pinjaman bank nasional, obligasi, *fund raising*, gaji pegawai negeri sipil. Sementara dana eksternal berasal dari pinjaman dari China dan diaspora Ethiopia.

Ethiopia melancarkan strategi ini dengan mengedepankan kemampuan bargaining yang dapat dikonsepsikan sesuai dengan 4 strategi menurut Cascao dan Zeitoun yaitu klaim moral yang tinggi (penggunaan hukum internasional), media publik dan kampanye advokasi hukum melawan proyek sepihak, isu terkait dan inisiatif kerjasama.³²

Ethiopia menggunakan hukum internasional untuk menegaskan bahwa pembangunan yang dikonstruksikan di wilayahnya tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Selanjutnya, upaya dilakukan dengan melibatkan Sudan

kedalam hubungan yang lebih langgeng. Aliansi Ethiopia-Sudan ini telah mengancam hubungan antara Mesir-Sudan yang kemudian direspon Mesir dengan melibatkan Amerika Serikat, Uni Afrika, dan World Bank untuk menetapkan pengaturan hukum yang mengikat atas GERD. Strategi selanjutnya yang dikembangkan Ethiopia adalah penyediaan energi listrik sebagai agenda kesejahteraan masyarakat juga eksportir ke negara tetangga. Hal yang kemudian dilakukan oleh Ethiopia adalah mengkombinasikan keterlibatan negara lain dalam pembicaraan GERD. Dalam hal ini forum NBI dipilih karena dinilai memiliki dasar yang kuat untuk membangun pendekatan semacam itu, termasuk penilaian strategisnya sendiri dan peluang yang teridentifikasi untuk investasi bersama di antara semua negara.³³

Tidak hanya berorientasi pada forum regional, Ethiopia juga melakukan kesepakatan trilateral bersama Mesir dan Sudan untuk membahas mengenai pembangunan GERD. Pertemuan diadakan pada Oktober 2011 untuk membangun dialog teknis yang kemudian berkembang menjadi proses negosiasi dan politik. Selanjutnya kementerian perairan dari ketiga negara menyepakati kerangka procedural untuk pembentukan Internasional Panel of Expert (IPoE). IPoE merupakan forum negosiasi yang mempertemukan perwakilan dari masing-masing negara bersama empat ahli lainnya untuk menganalisa keamanan dan manfaat dari GERD. Pada tahun setelahnya ketiga negara sepakat untuk menerbitkan laporan terkait keamanan dan mekanisme pembangunan GERD.

Respon yang diberikan kedua negara bertolak belakang dimana Sudan

³¹ "Alstom to Supply Hydroelectric Equipment for the Grand Renaissance Dam in Ethiopia | Alstom," accessed March 28, 2022, <https://www.alstom.com/press-releases-news/2013/1/alstom-to-supply-hydroelectric-equipment-for-the-grand-renaissance-dam-in-ethiopia>.

³² Cascao and Zeitoun, "Power, Hegemony, and Critical Hydropolitics." Hal. 36

³³ Ana Elisa Cascao and Alan Nicol, "GERD: New Norms of Cooperation in the Nile Basin?," *Water International* 41, no. 4 (2016): 1–24, doi:10.1080/02508060.2016.1180763. Hal.70

mendukung pembangunan GERD yang berpotensi untuk mengatur aliran Nil Biru dan berkontribusi pada perluasan irigasi sementara Mesir memperdebatkan validitas teknis dari studi tersebut dan memutuskan untuk mengadakan studi independen. Atas hal tersebut, hubungan Ethiopia-Mesir mengalami stagnan dan membuat Sudan harus menjadi mediator untuk kembali membicarakan kesepakatan. Pertemuan kembali diadakan pada Agustus 2014 hingga Desember 2015.

Dari kesepakatan ini lahir sebuah legitimasi yaitu Declaration of Principles (DOP). DOP ditandatangani di Khartoum oleh ketiga negara pada 23 Maret 2015. Deklarasi ini mengakui prinsip “no significant harm” dan “equitable and reasonable utilization” juga mengatur teknis seperti keamanan bendungan, pengisian, kebijakan pengoprasian dan pertukaran informasi. Kerangka ini tidak bersifat mengikat dan hanya mencakup 10 prinsip yang diharapkan dapat dipegang oleh ketiga negara. Meskipun begitu, konsen dari deklarasi ini tidak mengikat ketiga negara untuk sepenuhnya patuh pada deklarasi yang ada. Hingga akhirnya, deklarasi ini juga tidak efektif dalam menjalankan kesepakatan antara Ethiopia dan Mesir.

KESIMPULAN

Sungai Nil mengandung nilai strategis bagi negara-negara basin dimana sektor-sektor vital yang ada bertumpu pada eksistensi aliran Nil. Dalam aturan sungai transnasional, aliran air dari hulu ke hilir harus menganut prinsip ‘no significant harm’ dan ‘equitable use’ dalam pembangunan konstruksi hidrolis di negaranya. Prinsip ini menjadi acuan Ethiopia dalam mengedepankan visi sekuritisasi air nasionalnya. Ethiopia menganggap hegemoni Mesir atas Sungai Nil sebagai bentuk legitimasi ilegal sebab

disepakati pada masa kolonial. Ethiopia yang memprotes hegemoni Mesir atas Nil memicu peningkatan tensi diantara keduanya.

Ethiopia kemudian mulai menggagas strategi sekuritisasi air melalui pembangunan GERD. Pembangunan tersebut direspon Mesir dengan anggapan bahwa Ethiopia telah mengganggu stabilitas dan jumlah volumetrik air yang akan mengalir ke negaranya. Akan tetapi Ethiopia berhasil melancarkan pembangunan ini dengan mengedepankan mekanisme normatif dan kemampuan bargainingsnya dalam forum bilateral maupun regional. Di sisi lain, Mesir yang disibukkan dengan agenda politik dan gejolak *Arab Spring* mulai kehilangan kekuatannya diantara negara-negara basin.

Kesempatan ini dimanfaatkan Ethiopia dengan mengkampanyekan pembangunan GERD tidak merugikan negara lain dan sesuai dengan hukum internasional juga mengajak Mesir dalam inisiatif kooperatif trilateral yang kemudian menghasilkan deklarasi prinsip. Meskipun begitu, kedua negara masih terlibat pasang surut akibat keinginan masing-masing negara untuk mengamankan air domestiknya. Akan tetapi, strategi Ethiopia dalam pembangunan GERD telah berhasil terbukti dari rampunya bendungan tersebut pada Februari 2022 dan sedang dalam tahap awal pengoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Cascão, Ana Elisa, and Mark Zeitoun. “Power, Hegemony, and Critical Hydropolitics.” In *Transboundary Water Management*, edited by J. Ojendal A. Earle, A. Jägerskog, 27–

194. UK: Earthscan, 2010.

Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi*. 1st ed. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990.

Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nation: The Struggle For Power and Peace*. Alfred A. Knopf. 1st Editio. New York: Alfred A. Knopf, 1948.

Jurnal

Cascão, Ana Elisa, and Alan Nicol. "GERD: New Norms of Cooperation in the Nile Basin?" *Water International* 41, no. 4 (2016): 1–24. doi:10.1080/02508060.2016.1180763.

Cascão, Ana Elisa. "Changing Power Relations in the Nile River Basin: Unilateralism vs. Cooperation?" *Water Alternatives* 2, no. 2 (2009): 245–68.

Deng, BK. "Cooperation between Egypt and Sudan over the Nile River Waters: The Challenges of Duality." *African Sociological Review / Revue Africaine de Sociologie* 11, no. 1 (2010): 38–62. doi:10.4314/asr.v11i1.51433.

Gupta, Joyeeta. "The Watercourses Convention, Hydro-Hegemony and Transboundary Water Issues." *International Spectator* 51, no. 3 (2016): 118–31. doi:10.1080/03932729.2016.1198558.

Liersch, Stefan, Hagen Koch, and Fred Fokko Hattermann. "Management Scenarios of the Grand Ethiopian Renaissance Dam and Their Impacts under Recent and Future Climates." *Water (Switzerland)* 9, no. 10 (2017): 1–24. doi:10.3390/w9100728.

Mekonnen, Dereje Zeleke. "The Nile Basin Cooperative Framework Agreement Negotiations and the Adoption of a

'water Security' Paradigm: Flight into Obscurity or a Logical Cul-de-Sac?" *European Journal of International Law* 21, no. 2 (2010): 421–40. doi:10.1093/ejil/chq027.

Saidin, Mohd Irwan Syazli. "Rethinking the 'Arab Spring': The Root Causes of the Tunisian Jasmine Revolution and Egyptian January 25 Revolution." *International Journal of Islamic Thought* 13, no. 1 (2018): 69–80. doi:10.24035/ijit.06.2018.007.

Whittington, Dale, Xun Wu, and Claudia Sadoff. "Water Resources Management in the Nile Basin: The Economic Value of Cooperation." *Water Policy* 7, no. 3 (2005): 227–52. doi:10.2166/wp.2005.0015.

Zeitoun, Mark, and Jeroen Warner. "Hydro-Hegemony - A Framework for Analysis of Trans-Boundary Water Conflicts." *Water Policy* 8, no. 5 (2006): 435–60. doi:10.2166/wp.2006.054.

Report

Prof, Assist, and Etlal Salim. "Egyptian-Ethiopian Relations 1952-2015." *Opcion*. Vol. 19, 2019.

Progress, Africa, and Group Report. "Draft 2020 Africa Progress Group Report 1," 2020, 1–152.

Website

"2022 Egypt Military Strength." *Global Fire Power*. Accessed March 4, 2022. https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=egypt.

"A Tech Revolution in Ethiopia - Nairametrics." Accessed March 26,

2022.
<https://nairametrics.com/2019/12/20/a-tech-revolution-in-ethiopia/>.
- “African Countries by Population (2022) - Worldometer.” Accessed February 20, 2022.
<https://www.worldometers.info/population/countries-in-africa-by-population/>.
- “Alstom to Supply Hydroelectric Equipment for the Grand Renaissance Dam in Ethiopia | Alstom.” Accessed March 28, 2022.
<https://www.alstom.com/press-releases-news/2013/1/alstom-to-supply-hydroelectric-equipment-for-the-grand-renaissance-dam-in-ethiopia>.
- Carlson, Andrew. “Who Owns the Nile? Egypt, Sudan, and Ethiopia’s History-Changing Dam | Origins: Current Events in Historical Perspective.” *History Departments at The Ohio State University and Miami University*, 2013.
<https://origins.osu.edu/article/who-owns-nile-egypt-sudan-and-ethiopia-s-history-changing-dam>.
- “Climate Change Is an Increasing Threat to Africa | UNFCCC.” *United Nation Climate Change*, October 27, 2020.
<https://unfccc.int/news/climate-change-is-an-increasing-threat-to-africa>.
- “Egypt GDP per Capita, 1982 – 2022 | CEIC Data.” Accessed June 6, 2022.
<https://www.ceicdata.com/en/indicator/egypt/gdp-per-capita>.
- “GDP per Capita (Current US\$) - Ethiopia, Egypt, Arab Rep. | Data.” *World Bank*. Accessed March 4, 2022.
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?contextual=default&locations=ET-EG>.
- “Grand Ethiopian Renaissance Dam Project, Benishangul-Gumuz.” Accessed March 27, 2022. <https://www.water-technology.net/projects/grand-ethiopian-renaissance-dam-africa/>.
- Karyabwite, Dr. “Water Sharing in the Nile River Valley.” *UNEP*, 2000.
http://www.ihwb.tu-darmstadt.de/media/fachgebiet_ihwb/lehre/iwrwm/literature/watersharinginthenilerivervalley.pdf.
- Nile Basin Initiative. “Who We Are | Nile Basin Initiative (NBI).” Accessed September 18, 2021.
<https://www.nilebasin.org/index.php/nbi/who-we-are>.
- “SPECIAL REPORT: PROSPECTS OF ANOTHER WAR IN THE HORN OF AFRICA – PANGEA-RISK,” January 18, 2021. <https://www.pangea-risk.com/special-report-prospects-of-another-war-in-the-horn-of-africa/>.